

# **ANALISIS PENGELOLAAN PARKIR UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANJARMASIN (studi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin)**

Syalafuddin<sup>1</sup>, Dwi Wahyu Artiningsih<sup>2</sup>, Berta Lestari<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Prodi Manajemen, 61201, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan MAB. NPM.16310787

<sup>2</sup> Prodi Manajemen, 61201, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIK.061702981

<sup>3</sup> Prodi Manajemen, 61201, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIK.06151510801

## **ABSTRAK**

Retribusi parkir adalah fasilitas di bahu jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat parkir, adanya iuran atas penggunaan jasa parkir. Pada proses pendapatan retribusi parkir di Kota Banjarmasin dipungut dari setiap masyarakat yang menggunakan jasa tempat parkir tepi jalan umum yang disediakan pemerintah daerah. Pengenaan tarif parkir berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan oleh masyarakat. Setiap masyarakat yang menggunakan jasa parkir akan merasakan pelayanan parkir yang dilakukan oleh juru parkir. Pelayanan yang dapat dinikmati oleh pengguna jasa parkir adanya keamanan kendaraan, ketertiban jalan. Agar pelayanan tetap berjalan dengan semestinya, pihak Pemerintah Daerah selalu melakukan evaluasi pelayanan retribusi parkir dengan selalu memberikan motivasi, arahan kepada pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika dan juru parkir. Dengan begitu pelayanan dapat memberi kenyamanan kepada masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan retribusi parkir. Peningkatan pendapatan retribusi parkir perlu dilakukan agar meningkatkan pendapatan asli daerah kota Banjarmasin, karena berpengaruh pada perkembangan daerah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Pengelolaan Parkir Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banjarmasin (studi pada Dinas Perhubungan Banjarmasin). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), dimana peneliti mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena atau kejadian keadaan yang alamiah, dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan retribusi parkir di Kota Banjarmasin sudah berjalan cukup efektif dan efisien. Dimana pengelolaan mulai dari perencanaan (planning) yaitu dengan menaikkan tarif parkir, menaikkan setoran juru parkir dan menertibkan izin-izin baru terkait parkir. Pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan sudah berjalan cukup baik.

Kata Kunci : Pengelolaan Parkir, Pendapatan Daerah

## **ABSTRACT**

*Parking retribution is a facility on the shoulder of a public road provided by the local government as a parking lot, there is a fee for the use of parking services. In the revenue process, parking fees in the city of Banjarmasin are collected from all people who use public roadside parking services provided by the local government. Parking rates are imposed based on the type of vehicle used by the community. Every community who uses parking services will experience parking services carried out by parking attendants. Services that can be enjoyed by parking service users are vehicle safety, road order. In order for the service to continue properly, the Regional Government always evaluates the service of parking fees by always providing motivation, direction to employees of the Office of Transportation, Communication, Informatics and parking attendants. That way the service can provide comfort to the community and can increase parking fee income. An increase in parking fee income needs to be done in order to increase the local income of the city of Banjarmasin, because it affects regional development. The problem studied in this research is about Parking Management Efforts to Increase Local Revenue in Banjarmasin City (study at the Banjarmasin Transportation Agency). This research uses the type of field research (Field Research), where the researcher makes observations about a phenomenon or natural occurrence, with the aim of knowing the management of parking fees in increasing local revenue with an Islamic economic perspective through a descriptive-qualitative approach. The results of this study indicate that the management of parking fees in the city of Banjarmasin is quite effective and efficient. Where management starts from planning, namely by increasing parking rates, increasing parking attendant deposits and curbing new parking-related permits. Organizing, mobilizing and supervising have been going quite well.*

*Keywords: Parking Management, Regional Income*

## PENDAHULUAN

Salah satu prasarana yang harus ada di setiap kota diantaranya adalah prasarana parkir, seiring dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia di dalamnya. Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.

Masalah perparkiran merupakan masalah yang kompleks. Tingginya populasi penduduk dibarengi dengan kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin tinggi berimplikasi pada peningkatan arus transportasi baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disamping itu juga masalah kemacetan yang kerap menjadi topik pembahasan, masalah parkir juga menjadi persoalan sendiri yang di alami oleh kota-kota besar di seluruh dunia. Tingginya intensitas aktivitas di kawasan pusat kota memberi pengaruh terhadap kondisi lalu lintas. Pusat aktivitas dapat berupa pusat bisnis, kompleks universitas, kawasan industri dan pusat hiburan. Alat transportasi merupakan alat yang vital untuk zaman modern seperti sekarang ini, sehingga banyaknya pengguna kendaraan pribadi terus bertambah dari tahun ke tahun. Sifat konsumtif manusia cenderung akan membeli barang-barang yang tidak butuhkan hanya karena barang tersebut

terlihat menarik. Apabila kendaraan terus bertambah, otomatis kebutuhan lahan parkir pun akan cenderung bertambah, sehingga perlu suatu perencanaan lahan parkir yang efisien agar dapat digunakan secara optimal namun tetap nyaman dalam mengatur posisi parkir. Kehidupan sehari-hari parkir adalah pemandangan yang khas dimata kita. Sering melihat parkir di ruas jalan dan tidak jarang juga kita melihat orang yang memarkir kendaraan dengan seandainya sendiri sehingga mengganggu pengguna jalan lain, baik pejalan kaki maupun mereka yang menggunakan kendaraan. Ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam permasalahan perparkiran di antaranya adalah lahan parkir, tarif parkir, kenyamanan serta pelayanan parkir. Orang selalu menginginkan kendaraanya di parkir di tempat yang dekat dengan tujuannya, di tempat-tempat keramaian (umum), di mana kebutuhan tingkat parkir sangat tinggi, keadaan ini sering kali menimbulkan permasalahan yang serius. Kapasitas lahan parkir tidak seimbang dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada. Selain itu, penyebab lain kurangnya ketersediaan lahan parkir, disebabkan karena banyaknya lahan terbuka yang dikonversikan menjadi gedung-gedung bertingkat dan perumahan.

Kebijakan parkir telah menjadi penting, hal ini berpengaruh untuk peran ruang parkir yang tidak berkelanjutan pembangunannya untuk mengatasi permintaan ruang parkir. Sebaliknya, kebijakan parkir yang bijaksana mungkin menawarkan alat untuk mengatasi masalah-masalah yang berkembang. Pentingnya parkir dalam kebijakan transportasi sering diremehkan. Namun faktanya menemukan tempat untuk parkir yang potensial adalah paling penting daripada keprihatinan atas

kurangnya ruang jalan yang tersedia untuk menampung kendaraan bermotor.

Pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya bidang parkir. Apabila pelayanan publik yang dilakukan pemerintah baik/berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian ini bertempat di Dinas Perhubungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Kota Banjarmasin. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan pengelolaan manajemen parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Banjarmasin.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dari obyek penelitian secara sederhana. Deskriptif eksploratif riset dapat dikatakan sebagai penelitian yang mengklarifikasi data yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan dan menggambarkan kondisi obyek tentang manajemen parkir.

## **PEMBAHASAN**

Masalah yang timbul dalam penggunaan instrumen instrumen tersebut adalah instrumen dimana yang mana yang harus digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Pemilihan instrumen yang akan digunakan tergantung masalah apa yang dihadapi tujuan apa yang ingin dicapai dampak – dampak apa yang mungkin timbul dan sebagainya. Dalam penerapan berbagai instrumen kadang kadang dijumpai bahwa pemecahan suatu masalah atau mencapai suatu

tujuan tidak cukup hanya diterapkan satu instrumen. Untuk mencapai suatu tujuan mungkin perlu diterapkan beberapa instrumen kebijaksanaan sekaligus.

### **A. Pengaturan Parkir**

Parkir dapat digunakan sebagai salah satu alat pengaturan dalam manajemen lalu lintas, disamping parkir digunakan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu perlu diatur sedemikian sehingga pendapatan retribusi parkir diperoleh dan lalu lintas dapat berjalan lancar sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi dan kemudian dapat memarkirnya di tempat tujuan perjalanannya baik di tempat parkir di pinggir jalan maupun luar jalan.

Informasi yang perlu diketahui adalah lamanya parkir dilakukan (durasi parkir) dan besarnya permintaan parkir (demand) kemudian di lihat sejauh mana dapat dipenuhi dengan ruang parkir yang disediakan di pinggir jalan dan ruangan parkir di luar jalanan. Selanjutnya metode operasinya juga perlu dipelajari antara lain besarnya tarif parkir yang diberlakukan, golongan tarif yang diberlakukan serta metode pembayaran retribusi parkir

### **Pengaturan Tarif Parkir**

Pertimbangan yang perlu diannil oleh pemerintah daerah dari retribusi parkir ini ataupun pengembang yang memiliki ataupun mengusahakan tempat parkir adalah bagaimana menetapkan tarif parkir yang paling tepat, tidak terlalu murah ataupun terlalu mahal. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi dapat ditetapkan tarif parkir yang optimal, sehingga retribusi parkir ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.

### **B. Pengawasan Parkir**

Sebagai satu bagian penting dari manajemen lalu lintas khususnya yang menyangkut parkir adalah pengawasan. Pengawasan merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan secara tegas dan dilakukan secara terus menerus. Sebab kalau tindakan terhadap pelanggaran tidak dilakukan. Pelanggaran akan di ulangi oleh masyarakat karena merasa

tidak mendapatkan hukuman terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.

Philosophi dan pengawasan adalah seseorang itu cenderung untuk mematuhi aturan kalau merasa diawasi atau pun tidak diambil tindakan terhadap pelanggaran masyarakat cenderung untuk melakukan pelanggaran. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam manajemen lalu lintas adalah pelaksanaan pengawasan yang terus menerus dan tegas dalam mengambil tindakan terhadap pelanggar parkir

Parkir liar merupakan suatu penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemerawutan dan bahkan kecelakaan baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Hal ini juga akan menimbulkan masalah khusus apabila terjadi suatu keadaan darurat, seperti adanya kendaraan pemadam kebakaran, ambulance atau kendaraan dengan kebutuhan khusus lainnya. Pengendalian dan penindakan umumnya adalah merupakan suatu masalah setempat dan harus ditata adimistrasinya oleh pemerintah daerah (Walikota/Bupati) melalui dinas perhubungan setempat melalui beberapa jenis organisasi pengelolaan parkir

### **Pegawasan Parkir**

Kegiatan pengawasan lalu lintas pada umumnya parkir pada khususnya meliputi pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas, Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dari kebijaksanaan kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan

Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kntena penilaian, analisis tingkat pelayanan analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan

### **Objek Pengawasan**

Sasaran pelaksanaan pengawasan parkir adalah terhadap pelanggaran parkir yang meliputi :

- a. Parkir ditempat dimana parkir dilarang ataupun dilarang berhenti Parkir diatas trotoar
- b. Parkir ganda, Mesin hidup pada saat parkir di pelataran parkir ataupun gedung parkir
- c. Parkir ganda
- d. Mesin hidup pada saat parkir dipelataran parkir maupun digedung parkir
- e. Parkir ditempatkan khusus untuk kendaraan tertentu, misalnya parkir di tempat parkir bagi pendenta cacat
- f. Lampu hidup pada waktu kendaraan parkir

### **Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas**

Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan, Metode pelaksanaan tindakan korektif dilakukan dengan beberapa cara baik tindakan phisik maupun dengan melakukan penilangan ataupun penyuluhan

#### **Tindakan Phisik**

Ada beberapa tindakan phisik yang efisien yang dapat dilakukan terhadap pelanggar parkir, yaitu:**Derek DAN Kunci Roda (Wheel clamp)**

#### **Pengawasan Petugas**

Petugas pengawasan jalan dapat melakukan pengawasan terhadap tempat tempat dimana parkir dilarang ataupun berhenti dilarang petugas penyidik yang menemukan pelanggaran diwajibkan untuk berhenti dan menilang pelanggar. Apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan parkir yang diberlakukan ditempat yang bersangkutan Pasal yang diberlakukan terhadap pelanggar adalah pasal 61 ayat 1 Undang undang No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dimana dikatakan bahwa :

*Barang siapa melanggar ketentuan mengenai rambu rambu dan marka jalan , alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintasm*

*berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar kecepatan maksimum atau minimum dan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah)*

*Sedangkan pasal 23 ayat 1 huruf d berbunyi : Mematuhi ketentuan kelas jalan, rambu rambu dan marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas,berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotorm penggunaan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar kecepatan maksimum dan / atau minimum tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.*

Pengendalian perusahaan parkir merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi pengusaha parkir tanpa mempengaruhi hasil pekerjaan yang merupakan program yang harus diselenggarakan dengan cerdas dan dilakukan secara cermat secara terus menerus. Pengendalian parkir merupakan bagian dari tugas rutin yang harus dilakukan pihak manajemen Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) parkir kota Banjarmasin. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan jalannya UPTD adalah dengan Gugus Kendali Mutu (GKM)

### **C. Ruang Lingkup Pengendalian**

Sebagai bagian dari kegiatan pembinaan dan pengawasan parkir adalah pengendalian. Kegiatan pengendalian parkir meliputi :

a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan parkir; Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pembenahan pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen parkir, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.

b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam melaksanakan kebijaksanaan parkir.

Beberapa prinsip dasar yang harus dilakukan pihak manajemen perusahaan adalah

- a. Merupakan proses siklus manajemen, yaitu perencanaan pengendalian perusahaan parkir, pelaksanaan dan rencana yang disusun yang harus dinilai pelaksanaannya, dan bila ternyata masuk ada yang dapat ditingkatkan efisiensinya maka dilakukan perencanaan kembali
- b. Harus didukung dengan organisasi UPTD perparkiran yang baik dimana para anggotanya dapat bekerja sama dengan baik.
- c. Merupakan pekerjaan sistematis yang dilaksanakan untuk setiap jenis pekerjaan
- d. Merupakan tanggung jawab UPTD perparkiran secara utuh untuk mencapai tujuan penggunaan sumber daya secara efisien mulai dan pucuk pimpinan sampai kepada operator pelaksanaan pekerjaan dalam hal ini juru parkir
- e. Tanggung jawab dan wewenang pengendalian sumber daya harus dapat dilimpahkan.
- f. Program harus dinilai, direncanakan kembali bila dalam pelaksanaannya dirasakan masih terdapat kekurangan kekurangan yang masih dapat ditingkatkan efisiensinya. Jadi dengan kata lain proses ini merupakan suatu proses yang tidak ada hentinya.

### **A. Gugus Kendali Menu**

Gugus Kendali Mutu pada awalnya dikembangkan di Jepang pada tahun 1960an, yang pada waktu gencar gencarnya melaksanakan peningkatan efisiensi pekerjaan. Keberhasilan ini kemudian diikuti oleh berbagai negara, termasuk Indonesia yang mulai menerapkannya pada tahun 1980an.

### **Hakekat Gugus Kendali Mutu**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang perbaikan cara bekerja dan pengembangan pekerjaan.
- b. Menghargai sesama pekerja sehingga dapat menciptakan lingkungan pekerjaan yang menarik dan menggembirakan bagi setiap anggota organisasi.
- c. Memberi kesempatan sepenuhnya kepada setiap karyawan untuk mendayagunakan potensi masing masing individu secara tidak terbatas

### **Langkah Penyelesaian Masalah Dengan GKM**

Langkah langkah pemecahan masalah secara gugus kendali mutu ditunjukkan dalam bagan yang dikembangkan disampaikan dalam gambar :

#### **a. Menemukan Permasalahan**

Permasalahan adalah segala sesuatu yang menyimpang dari standar yang ditetapkan ataupun terjadi penyimpangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Didalam menjalankan suatu usaha selalu akan timbul permasalahan, oleh karena itu harus diperlukan suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah tersebut, salah satu cara permasalahan tersebut dipecahkan dengan pendekatan Gugus Kendali Mutu.

#### **b. Sebab Permasalahan**

Permasalahan timbul karena ada suatu faktor atau beberapa faktor dari pekerjaan yang tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan, untuk itu perlu dikenali faktor faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut

#### **c. Faktor Dominan**

Faktor penyebab masalah harus dianalisis secara terinci untuk menentukan faktor mana yang paling dominan mempengaruhi masalah.

#### **d. Langkah Pemecahan**

Setelah faktor penyebab masalah ditemukan maka dapat diusulkan langkah pemecahan terutama perhatian pemecahan harus diarahkan pada penyebab yang paling dominan

#### **e. Penerapan perbaikan**

Langkah pemecahan setelah dibahas secara mendalam dapat diterapkan sesuai dengan rencana pemecahan yang diusulkan

#### **f. Pemantauan pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan penerapan perbaikan harus dilakukan pemantauan terhadap keberhasilan menerapkan usulan perbaikan

#### **g. Mencegah timbulnya masalah yang sama**

Untuk menghindari masalah yang sama timbul maka perlu dilakukan pemantauan terhadap standar ataupun tujuan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

#### **h. Memperhatikan permasalahan yang lain**

Setelah suatu permasalahan terselesaikan perhatian diarahkan kepada mencari permasalahan lain yang perlu diselesaikan dan bila ditemukan maka proses Gugus Kendali Mutu ini dijalankan kembali

### **B. Pengendalian Pendapatan UPTD Parkir**

Pemasukan pemerintah daerah dari retribusi parkir sangat dipengaruhi oleh metoda yang digunakan untuk mengumpulkan retribusi tersebut. Dikawasan yang dikendalikan biasanya lebih mudah untuk mengendalikan pendapatan. Karena biaya parkir dikumpulkan di gardu/pos pintu masuk kawasan yang jumlahnya terbatas, sedangkan parkir di pinggir jalan, dimana juru parkir berfungsi sebagai kasir, sehingga lebih sulit dikendalikan.

Pendapatan asli daerah sektor transportasi yang diperoleh dari retribusi parkir cukup berarti. Oleh karena perlu dikendalikan dengan baik sehingga kebocoran yang terjadi dapat ditekan sekecil mungkin.

Berbeda dengan ketentuan yang berlaku sebelum ini retribusi parkir hanya dapat dilakukan dipinggir jalan dan pada tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah sedangkan bagi pelataran/gedung parkir yang dimiliki atau dikelola oleh swasta retribusi parkir tidak dapat dipungut.

Pemanfaatan dari pajak retribusi parkir di daerah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan

sebaik baiknya sehingga dapat secara efisien dipergunakan untuk memperbaiki prasarana dan sarana transportasi, khususnya perbaikan fasilitas parkir. Sehingga akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan fasilitas parkir.

### **Masalah dalam pengendalian pendapatan parkir**

Ada beberapa masalah yang ditemukan dalam pengendalian pendapatan yang dikumpulkan dari retribusi parkir. Masalah ini kurang begitu besar pada kawasan parkir dimana pemarkir membayar retribusi parkir pada saat masuk ataupun keluar dari kawasan parkir tetapi terutama terjadi pada parkir dipinggir jalan yang dikendalikan oleh juru parkir. Masalah tersebut antara lain :

#### **Penolakan untuk membayar**

Meskipun hal ini terjadi, terutama bagi pengemudi motor ataupun golongan masyarakat tertentu yang tidak mau membayar retribusi parkir. Hal ini kadang kadang menimbulkan keributan antara juru parkir dengan pemarkir.

#### **Pengumpulan pendapatan oleh petugas tidak resmi**

Jumlah juru parkir tidak resmi cukup banyak di beberapa kota besar, bahkan mereka menggunakan seragam juru parkir, mereka umumnya beroperasi di kawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan parkir seperti didepan apotek, toko swalayan kecil, ataupun kegiatan kegiatan bisnis yang tidak berada pada sentra primer ataupun sekunder suatu kota. Sebagian dari juru parkir yang demikian itu dikendalikan oleh jeger (mafia parkir). Bila jumlah juru parkir tidak resmi ini banyak maka potensi pendapatan asli daerah yang hilang cukup besar.

#### **Penarikan tarif yang lebih tinggi**

Dikawasan pusat perdagangan/sentra primer yang tinggi tingkat penggunaan parkirnya ataupun di kota dimana tarifnya sudah sedemikian rendahnya, juru parkir sering meminta bayaran lebih kepada pemarkir ataupun pemarkir tidak meminta uang kembaliannya

#### **Juru parkir tidak menyetorkan hasil**

Kendala lain yang juga ditentukan dalam perparkiran adalah juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi parkir yang dipungutnya, ataupun tidak menyetorkan secara utuh.

Pengendalian terhadap hal ini menjadi sulit karena sering karcis tidak diberikan kepada pemarkir ataupun pemarkir yang tidak mau menerima karcis.

#### **Penggunaan karcis lebih dari satu kali**

Penggunaan karcis lebih dari satu kali sering dilakukan oleh petugas parkir.

#### **Tata cara menghitung potensi pendapatan parkir**

Untuk menghitung besarnya potensi pendapatan dari parkir sebagai acuan dalam perhitungan besarnya anggaran pendapatan dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut :

#### **Parkir dipinggir jalan**

Survei parkir dilakukan untuk mendapatkan masukan mengenai jumlah ruang parkir, tingkat penggunaan ruang parkir dalam satu hari, lamanya (durasi) parkir dilakukan. Informasi yang diperoleh dari survei parkir khususnya untuk parkir dipinggir jalan, dimana tarif parkir yang berlaku adalah tarif/kali parkir (tidak tergantung waktu selanjutnya di rekapitulasi)

#### **Pemeriksaan Keuangan Oleh Akuntan Publik**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih pasti mengenai pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan UPTD perparkiran ada baiknya secara reguler dilakukan pemeriksaan keuangan oleh akuntan publik.

#### **C. Pengendalian Petugas Parkir**

Pengendalian terhadap petugas parkir merupakan langkah yang penting yang harus dilakukan, sebab sebagian besar dari pendapatan dari parkir diperoleh dari retribusi yang mereka pungut. Oleh karena itu pengendalian petugas parkir merupakan isu

penting yang harus dilakukan oleh UPTD parkir kota Banjarmasin.

### **Masalah dalam pengendalian petugas parkir**

Ada beberapa masalah yang sering timbul dalam pengendalian terhadap petugas parkir, yaitu :

- 1) Parkir oleh petugas illegal ditempat parkir legal
- 2) Petugas illegal ditempat parkir illegal
- 3) Petugas legal meminta pemarkir untuk parkir ditempat dimana parkir dilarang (parkir ganda, parkir di tempat dilarang parkir)
- 4) Petugas memungut ongkos parkir diatas tarif yang diberlakukan.
- 5) Petugas tidak membagikan karcis parkir atau menggunakan kembali karcis yang sudah dibagikan sebelumnya kepada pemarkir lain.
- 6) Petugas parkir pulang lebih awal atau masuk kerja terlambat.
- 7) Dan lain lain.

### **Upaya pengendalian**

Untuk mengatasi masalah masalah tersebut diatas perlu dilakukan pengawasan secara terus menerus dan mengambil tindakan tegas untuk meluruskan keadaan bila terjadi pelanggaran. Langkah langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

### **Pengendalian terhadap petugas parkir resmi**

Pengawasan terhadap petugas parkir dapat dilakukan secara struktural melalui pengawasan melekat (Waskat) dua tingkat kebawah, dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh petugas. Objek pengawasan meliputi :

- a. Pemberian karcis kepada pemarkir serta besarnya tarif yang diberlakukan kepada pemarkir.
- b. Pendapatan yang disetorkan kepada unit pelaksana perparkiran.
- c. Tata cara mengatur parkir.
- d. Tata cara mengatur lalu lintas pada saat kendaraan masuk atau keluar ruang parkir.
- e. Seragam dan perlengkapan petugas parkir.
- f. Absensi petugas parkir.

### **Pengendalian terhadap petugas parkir illegal**

Untuk ini perlu dilakukan indentifikasi lokasi parkir yang dikelola oleh petugas parkir illegal, baik ditempat yang ditunjuk sebagai lokasi parkir ataupun ditempat tempat yang tidak ditunjuk sebagai lokasi parkir. Bila ditemukan petugas parkir yang demikian maka perlu diambil langkah pengendalian agar langkah pengendalian ini mempunyai kekuatan hukum maka ketentuan mengenai hal ini harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah mengenai perparkiran.

### **Jeger Parkir**

Disamping masalah yang diungkap diatas masih ada masalah yang cukup serius yang terjadi di kota kota besar adalah bahwa kawasan tertentu dibawah kendali jeger parkir (mafia parkir) untuk memecahkan masalah ini memang agak sulit apalagi kalau hal ini sudah terjadi sejak waktu yang lama. Oleh karena itu cegahlah hal ini

Upaya pencegahan jeger parkir ini perlu dilakukan secara konsisten dan terus menerus dan bila diperlukan untuk mengendalikan para jeger perlu melibatkan aparat pengaman

### **F. Bimbingan Dan Penyuluhan Parkir**

Salah satu isu penting dalam pengendalian kegiatan parkir adalah pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat pengguna sehingga mereka memahami latar belakang kebijaksanaan parkir. Selain itu juga diperlukan bimbingan dan penyuluhan kepada petugas dalam merencanakan dan menjalankan pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitas parkir.

### **Bimbingan dan penyuluhan kepada pemakai**

Dalam rekayasa lalu lintas dikenal prinsip 3 E (Engineering, Education, and Enforcement) atau yang dikenal sebagai 3P Perekayasaan, Pendidikan masyarakat dan Penegakan Hukum

Bentuk pendidikan masyarakat inilah merupakan proses bimbingan dan penyuluhan.



### **Materi yang disosialisasikan**

Untuk dapat menerapkan kebijaksanaan perparkiran, perlu disosialisasikan kepada masyarakat yang antara lain dapat dilakukan dengan

- 1) Sosialisasi pengaturan perparkiran melalui media cetak ataupun melalui media elektronik, terutama untuk pemasangan rambu yang bersifat perintah seperti halnya rambu larangan berhenti dan larangan parkir.
- 2) Sosialisasi dilapangan dengan cara mengarahkan pemakai jalan (pemarkir terutama terhadap rambu larangan yang baru dipasang selama rambu tersebut belum mempunyai kekuatan hukum (rambu larangan baru mempunyai kekuatan hukum setelah 30 hari sejak tanggal pemasangan)
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara parkir, terutama yang menyangkut tata cara masuk ke tempat parkir, keluar dari tempat parkir. Posisi roda depan pada saat parkir ditanjakan atau di turunan pemasangan rem tangan.

### **Metode bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat**

Sebelum melakukan bimbingan atau penyuluhan harus dipelajari terlebih dahulu metode apa yang akan digunakan. Metode yang dipilih meliputi :

- 1) Sebagai salah satu bagian mengenai tata cara parkir dalam buku petunjuk bagi pengemudi (highway code). Selain diperlukan oleh calon pengemudi yang sedang belajar mengemudi, diajarkan dalam pelatihan praktek mengemudi. Hal ini penting karena dalam pelatihan praktek mengemudi.hal ini penting karena merupakan bagian yang diujikan baik teori maupun praktek pada saat akan memperoleh Surat Izin Mengemudi.
- 2) Brosur yang berisi informasi singkat kepada masyarakat, misalnya mengenai tata cara parkir di tempat parkir.
- 3) Sticker yang berisi slogan mengenai parkir, biasanya kalimat pendek seperti :

“Parkirlah kendaraan anda ditempat yang ditunjuk”.

- 4) Iklan di surat kabar, yang mengiklankan secara singkat mengenai tata cara parkir.
- 5) Iklan di televisi berupa video clip mengenai tata cara parkir

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin, maka diperoleh kesimpulan:

1. Pengelolaan retribusi parkir di Kota Banjarmasin sudah berjalan cukup efektif dan efisien. Dimana pengelolaan mulai dari perencanaan (*planning*) yaitu dengan menaikan tarif parkir, menaikan setoran juru parkir dan menertibkan izin-izin baru terkait parkir. Pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan sudah berjalan cukup baik.
2. Pengoptimalan retribusi parkir Kota Banjarmasin dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan melihat potensi yang ada, menertibkan Peraturan Daerah perparkiran, penertiban jalan, mendata ulang juru parkir, dan monitoring/pengawasan lapangan. Dalam peningkatan pendapatan asli daerah merupakan kewajiban bagi pemerintah, karena pendapatan suatu daerah merupakan amanah dan harus dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Rozali. 2011.*Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Azwar, Saifudin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Bratakusumah, Deddy Supriyadi & Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gie, The Liang. 1967. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media
- Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemertaan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Surabaya: Erlangga.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press Cet II.
- Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV PustakaSetia.
- S.U., Ibnu Syamsi. 1994. *Pokok-pokok Organisasi & Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tobing, David M.L. 2007. *Parkir dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Timpani Agung.
- Widjaja, HAW. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.